



**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN (AKD)  
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI**

**KEGIATAN  
15 MARET – 22 MARET 2021**



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**BRIDGING THE RESEARCH TO THE ROLE AND FUNCTIONS OF PARLIAMENT  
“EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING”**

*See  
Us 28/3/21*

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN  
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN  
SETJEN DPR RI**

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1.	<b>KOMISI I</b>	<p>1. Sehubungan dengan belum ditetapkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna DPR RI, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komisi I DPR RI belum memulai penyusunan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran)</li> <li>b. Panja Pembahasan RUU tentang PDP belum melanjutkan pembahasan RUU tentang PDP</li> </ul> <p>2. Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDP dengan Ketua LSF dan Dirut Perum LKBN Antara dalam rangka mendapatkan penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) LSF mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi pencapaian kinerja LSF Tahun 2020;</li> <li>b. Program kerja Tahun 2021;</li> <li>c. Isu-isu aktual: Pedoman dan Kriteria Perfilman di Masa Pandemi Covid-19; Perkembangan Efektifitas Budaya Sensor Mandiri dan Sosialisasinya; Kajian dan Peran Strategi LSF terhadap Karya Film sebagai Alat Penetrasi Budaya untuk menjaga Jatidiri, Karakter dan Ketahanan Bangsa</li> </ul> </li> <li>2) Perum LKBN Antara mengenai:</li> </ul>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>a. Upaya strategis Perum LKBN Antara dalam penguatan pemberitaan di dalam maupun luar Negeri selama Masa Pandemi Covid-19;</p> <p>b. Laporan perkembangan penguatan Kelembagaan Perum LKBN Antara</p> <p>Dalam RDP tersebut disepakati kesimpulan sebagai berikut:</p> <p>(1) Komisi I DPR RI mengapresiasi capaian kinerja LSF dan Perum LKBN Antara TA 2020 dan mendorong agar pencapaian kinerja tersebut terus ditingkatkan di Tahun 2021.</p> <p>(2) Komisi I DPR RI mendorong LSF dan Perum LKBN Antara, melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. LSF</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan sosialisasi budaya sensor mandiri dalam membangun kemandirian dan kesadaran masyarakat secara bersama turut berkontribusi dalam memilih dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia.</li> <li>2) Peningkatan peran strategis dalam penguatan budaya, rasa nasionalisme sehingga menjaga jati diri, karakter dan ketahanan bangsa.</li> </ol> <p>b. Perum LKBN Antara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait penanganan pandemi covid-19, khususnya program vaksinasi covid-19 nasional.</li> <li>2) Peningkatan tanggungjawab untuk memastikan informasi berita nasional secara berimbang, tepat dan akurat khususnya untuk media luar negeri.</li> </ol>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>3) Penguatan National Newsroom sebagai upaya forum bersama LKBN Antara, LPP RRI dan LPP TVRI untuk agenda setting konten pemberitaan kenegaraan dan pemerintahan serta agenda publik dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(3) Selanjutnya, Komisi I DPR RI mendukung langkah LSF dan Perum LKBN Antara agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing secara optimal dan berkelanjutan pada TA 2021.</p> <p>3. Rapat Intern Panja Pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan Panja, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Panja Alutsista TNI</li> <li>b) Panja Dukungan Internet dalam Masa Pandemi Covid-19</li> <li>c) Panja Diplomasi Luar Negeri terkait Penanggulangan Covid-19</li> <li>d) Panja Keamanan Laut</li> </ul> <p>4. Pimpinan Komisi I DPR RI (Ketua dan 1 orang Wakil Ketua) menerima Courtesy Call dari Minister of Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Korea Selatan, Mr. Gang Eun-ho</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>5. Pimpinan Komisi I DPR RI (Ketua dan 1 orang Wakil Ketua) menghadiri serah terima Kapal Selam Alugoro-405 di Surabaya</p> <p>6. Kunker Spesifik Komisi I ke Pangkalan Udara TNI Iswahyudi Madiun, membahas terkait dengan kesiapan Alutsista, sarana dan prasarana, serta pemenuhan kesejahteraan Prajurit TNI pada satuan jajaran Lanud Iswahyudi dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok TNI.</p> <p>7. Kunker Spesifik Komisi I ke Korem 072/Pamungkas Yogyakarta, membahas terkait dengan kesiapan Alutsista, sarana dan prasarana, serta pemenuhan kesejahteraan Prajurit TNI pada satuan jajaran Korem 072/Pamungkas Yogyakarta dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok TNI.</p>
2.	<b>KOMISI II</b>	<p>1. Mendapatkan aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) perihal keinginan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada tahun 2022 khusus untuk Provinsi Aceh dan Percepatan Penetapan Rancangan Qanun Aceh tentang Pilkada. Terkait dengan hal ini, Komisi II setelah mendengarkan aspirasi dari DPRA ini akan segera mendiskusikannya dengan Pemerintah.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>2. Melakukan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri RI, Plt. Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, dan Ketua DKPP RI terkait persiapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Setelah mendengar dan menyimak pemaparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI dan pandangan/masukan dari Kementerian Dalam Negeri RI, terkait dengan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, Komisi II DPR RI meminta KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI untuk membuat perencanaan yang lebih rinci dalam bentuk simulasi tentang penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 terkait antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rincian tahapan dan waktu Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.</li> <li>b. Anggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.</li> <li>c. Sinkronisasi Pemuktahiran Data Pemilih (DPT) Berkelanjutan, KPU RI dengan Data Agregat Kependudukan perKecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) serta sinkronisasi data pemilih terkait pemutakhiran data pemilih di Luar Negeri.</li> <li>d. Koordinasi, Konsolidasi dan Komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 antara lain dengan Kementerian Dalam</li> </ol>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, TNI, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Pemerintah Daerah, dan Partai Politik.</p> <p>e. Penjelasan dasar hukum terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi tahapan Pemilu Serentak dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 seperti SIPOL, SIDALIH, SILON, SILOG, SIDAPIL, SIDAKAM, dan SIREKAP.</p> <p>3. Untuk mematangkan, memantapkan, dan finalisasi tentang konsep dan desain penyelenggara Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI akan membentuk Tim Kerja Bersama.</p> <p>4. Pada tanggal 16 Maret 2020 mendengarkan Presentasi dari Kepala Badan Keahlian DPR RI terkait dengan perkembangan penyusunan 12 (dua belas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi. Dari sejumlah judul RUU tersebut Komisi II kemudian memilih 4 (empat) judul RUU Provinsi sebagai tahap awal penyusunan RUU sebagai bentuk penyesuaian dasar hukum yang semula dibentuk di periode Republik Indonesia Serikat (RIS). Adapun untuk keempat judul RUU Provinsi tersebut, Komisi II pada tahap awal telah memilih RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah, RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, dan RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara. Masing-masing judul RUU tersebut akan dilanjutkan dalam masing-masing Panitia Kerja (Panja) RUU.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
3.	<b>KOMISI III</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi III DPR RI berencana akan melaksanakan penyusunan RUU tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan akan melaksanakan FGD pada 7 April 2021 guna mendengarkan masukan dari akademisi, praktisi dan tokoh masyarakat.</li> <li>2. Rapat Dengar Pendapat dengan KPK dan Dewan Pengawas KPK, dengan kesimpulan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendukung Pimpinan KPK untuk terus meningkatkan capaian kinerja dan efektivitas program pencegahan korupsi di berbagai sektor dan di berbagai kementerian/lembaga, terutama untuk meningkatkan kembali indeks persepsi korupsi nasional, menutup berbagai celah korupsi atau penyalahgunaan kewenangan yang merugikan perekonomian negara, serta meningkatkan angka kesadaran dan perilaku anti korupsi.</li> <li>b. mendesak Pimpinan KPK untuk segera menyelesaikan penanganan</li> <li>c. perkara korupsi yang terkait dengan kepentingan masyarakat, termasuk dalam meningkatkan kerjasama, pengawasan, dan memberikan penguatan kepada Polri dan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi secara efektif, profesional, dan independen.</li> <li>d. mendukung Pimpinan KPK agar meningkatkan pola manajemen pegawai dan kesejahteraan pegawai KPK yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta penerapan sistem reward and punishment yang lebih adil dan terukur, sehingga dapat menciptakan efektivitas, profesionalisme, dan akuntabilitas kerja yang tinggi.</li> </ol> </li> <li>3. Pertemuan Pimpinan Komisi III DPR RI dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Pimpinan Komisi III DPR RI menyampaikan mengenai UU ITE yang akan</li> </ol>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>difokuskan pada perbaikan dalam implementasinya dan mengkampanyekan bersosial media yang baik kepada masyarakat; menyampaikan harapan agar penerbangan internasional di Eropa sudah dapat dibuka kembali untuk warga negara Indonesia dan berharap ada kemudahan dalam proses visa bagi anggota parlemen yang melakukan kunjungan ke negara di Eropa; dan menyampaikan akan melakukan kunjungan balasan ke kantor Duta Besar Uni Eropa untuk membahas perihal masalah hukum di Indonesia agar terdapat kesamaan prinsip dan pandangan.</p> <p>4. Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan kesimpulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bersepakat melakukan reformasi terhadap sistem peradilan pidana terpadu melalui fungsi legislasi, dengan memprioritaskan kembali penyelesaian RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasarakatan, serta penyelesaian RUU tentang KUHAP dan kebutuhan RUU lainnya yang sudah termasuk dalam Prolegnas; sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.</li> <li>b. mendukung Menkumham RI untuk melaksanakan rencana prioritas kerja tahun 2021 di bidang Pemasarakatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan overcrowded/overkapasitas, termasuk dalam meningkatkan pencegahan dan pengawasan terhadap peredaran Narkoba, serta peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin hak-hak warga binaan di lembaga pemasarakatan.</li> </ol>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. mendukung Menkumham RI dalam pelaksanaan rencana prioritas kerja Kemenkumham 2021 di bidang Imigrasi, terutama untuk meningkatkan inovasi layanan publik dan meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas orang di berbagai tempat perlintasan untuk mencegah pelanggaran keimigrasian dan pengawasan orang asing.</li> <li>d. bersepakat untuk meningkatkan efektivitas forum Mahkumjakpol melalui Rapat Kerja Gabungan Komisi III DPR RI dengan mitra kerja terkait, dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan hukum, seperti penanganan Tindak Pidana Narkotika dan penerapan keadilan restoratif (restorative justice).</li> </ul> <p>5. Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Narkotika Nasional, dengan kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendesak Kepala BNN RI untuk lebih proaktif dan sungguh-sungguh dalam mencegah masuknya narkotika ke wilayah Indonesia, baik melalui jalur-jalur resmi maupun jalur tidak resmi, sesuai pemetaan yang telah BNN lakukan.</li> <li>b. meminta Kepala BNN RI untuk lebih meningkatkan intensitas pemberantasan dan pencegahan beredarnya narkotika di dalam Lapas/Rutan dengan melakukan kerjasama dan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Hukum dan HAM serta aparat penegak hukum lainnya.</li> <li>c. mendukung penuh Grand Strategy dan program Penyalahgunaan dan Pemberantasan Gelap Narkotika (P4GN) oleh BNN RI dalam upaya perang melawan narkotika (war on drugs)</li> </ul>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>untuk mewujudkan Indonesia Bersih Narkotika (Indonesia Bersinar), termasuk mendukung upaya peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia BNN RI beserta jajaran.</p> <p>d. meminta Kepala BNN RI untuk melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia dalam upaya mencari terobosan dan komitmen Pemerintah terkait dengan pemberantasan dan pencegahan narkotika, termasuk dukungan legislasi berupa revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p>
4.	<b>KOMISI IV</b>	<p>1. Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian; serta dengan Perum Bulog dan BUMN Pangan pada tanggal 15 Maret 2021 yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 18 Maret 2021, guna membahas mengenai kesiapan Persiapan dan Ketersediaan Pangan menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan. Beberapa poin penting dalam kedua rapat tersebut antara lain:</p> <p>a. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian bahwa produksi beras periode Januari s.d Mei Tahun 2021 surplus/memenuhi konsumsi dalam negeri. Sehingga, Komisi IV DPR RI menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton pada saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah. Selain itu, Komisi IV DPR</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>RI meminta Pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri</p> <p>b. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, pengendalian dan sistem pengawasan yang komprehensif terhadap adanya impor pangan guna menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia, yang tertuang dalam Program Kerja Tahun 2021.</p> <p>c. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan identifikasi dan pemetaan terkait produksi, pasokan dan harga pangan maupun barang kebutuhan pokok di tingkat nasional dan daerah, serta identifikasi kesiapan pemerintah daerah untuk menghindari terjadinya kekurangan pasokan, gangguan produksi pangan hingga permasalahan di tingkat distribusi sepanjang tahun 2021.</p> <p>d. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melengkapi data ketersediaan produksi pangan dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan di tahun 2021 di tingkat nasional, maupun yang berasal dari provinsi, dan kabupaten/kota termasuk data ekspor dan impor per komoditas serta data Kerjasama Operasional (KSO) dengan BUMN maupun Pemda. Selanjutnya data tersebut disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rapat Kerja ini berlangsung.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>e. Komisi IV DPR RI akan mengagendakan Rapat Gabungan dengan Pemerintah terkait dengan upaya melindungi lahan pertanian produktif melalui jaminan lahan pengganti terhadap alih fungsi lahan pertanian produktif yang terkena dampak Proyek Strategis Nasional dalam Masa Sidang berikutnya.</p> <p>f. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kerjasama dengan Perum BULOG dan BUMN Klaster pangan dalam menyerap hasil produksi pangan yang berkualitas dan bermutu dari masyarakat gunaantisipasi keamanan konsumsi dan distribusi pangan ke berbagai pasar.</p> <p>g. Komisi IV DPR RI mendesak kepada Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memfasilitasi pembangunan rantai dingin pada kelompok-kelompok usaha pangan dan ikan untuk memperpanjang waktu simpan, menjaga kualitas, menjaga pasokan dan harga yang menguntungkan bagi petani dan nelayan.</p> <p>h. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian selambat-lambatnya 2 (dua) minggu untuk segera menuntaskan permasalahan impor jahe merah dengan memusnahkan komoditas tersebut yang masuk ke pelabuhan Tanjung Perak Provinsi Jawa Timur dan Tanjung Priok karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>i. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang seimbang (antara menyerap gabah petani dan penugasan penyaluran) kepada Perum BULOG dalam melaksanakan penugasan pengadaan dan penyaluran komoditas pangan strategis nasional. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI merekomendasikan untuk melanjutkan penugasan kepada Perum BULOG mengenai pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan mengutamakan penyerapan gabah beras produsen dan penugasan untuk penyaluran kepada masyarakat berpendapatan rendah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka ketahanan pangan nasional, dengan demikian terjadi perputaran stok beras di Gudang BULOG.</p> <p>j. Komisi IV DPR RI meminta BUMN Klaster Pangan di sektor kelautan perikanan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, pengendalian dan sistem pengawasan yang komprehensif terhadap adanya impor garam untuk industri aneka pangan yang diduga masih terjadi kebocoran di pasar tradisional, serta menyerap garam rakyat dan perbaikan kualitas NACL sehingga kehadiran negara dapat menyejahterakan petambak garam.</p> <p>k. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk melakukan pemetaan secara komprehensif kondisi pangan nasional terutama peta terkait dengan ketersediaan dan cadangan pangan, hingga Peta daerah Produksi dan daerah yang</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>sering mengalami kelangkaan pangan pokok saat menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional.</p> <p>1. Komisi IV DPR RI meminta BUMN bidang Pertanian dan Kelautan Perikanan untuk menjalin kerjasama dengan BUMDes, Koperasi, Lembaga Permodalan, serta Kelompok Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang menjadi binaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) sehingga dapat membantu memulihkan perekonomian petani dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terkena dampak Pandemi Covid-19.</p> <p>m. Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG untuk berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dengan Kementerian Sosial agar penyaluran beras kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dilakukan oleh Perum BULOG.</p> <p>n. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis dan mengubah kewajiban Wajib Tanam Komoditas Bawang Putih yang dilakukan oleh Importir dilakukan sebelum diterbitkan RIPH.</p> <p>o. Komisi IV DPR RI bersepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) mengenai Pangan. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk membentuk Badan Pangan Nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>2. Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove pada tanggal 16 Maret 2021, guna membahas Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove. Adapun poin-poin penting dalam rapat tersebut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove terkait Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove.</li> <li>b. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan prioritas rehabilitasi ekosistem mangrove di Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang merupakan ekosistem mangrove kritis terluas di Indonesia.</li> <li>c. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk memberikan insentif berupa</li> </ul>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>program dan kegiatan bagi masyarakat yang telah menjaga keberadaan dan kelestarian ekosistem mangrove di daerahnya.</p> <p>d. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat serta meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan mangrove dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove.</p> <p>e. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan secara intensif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove.</p> <p>f. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk meningkatkan program pemanfaatan jasa lingkungan, termasuk hasil hutan non kayu dan produk olahan turunan mangrove, dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar ekosistem mangrove.</p> <p>g. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar terus melakukan upaya pencegahan dan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>pemberantasan kegiatan perusakan ekosistem mangrove sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terus melakukan pengawalan terhadap seluruh proses penegakan hukum sampai berakhirnya kasus tersebut.</p> <p>h. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan data deforestasi ekosistem mangrove serta data realisasi rehabilitasi ekosistem mangrove per provinsi untuk periode 10 (sepuluh) tahun terakhir, baik data tabulasi maupun data spasial. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta data dimaksud dapat diterima selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.</p> <p>i. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan data pengelola kawasan yang bertanggung jawab atas ekosistem mangrove di Pantai Utara Jawa. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta data dimaksud dapat diterima selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.</p> <p>j. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan informasi mengenai usulan pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta informasi tersebut dapat diterima selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.</p> <p>3. Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan Perikanan, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 17 Maret 2021, guna membahas Peraturan Pemerintah Hasil Turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun poin-poin penting dalam rapat tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Peraturan Pemerintah Hasil Turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</li> <li>2. Komisi IV DPR RI bersama-sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan sepakat untuk melakukan Focused Group Discussion (FGD) untuk melakukan pendalaman terhadap muatan materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah dibidang pertanian, bidang lingkungan hidup dan kehutanan, serta bidang kelautan dan perikanan, dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian. Selanjutnya Komisi IV DPR RI bersama-sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan</li> </ol>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan sepakat untuk bersama-sama melakukan sosialisasi atas peraturan perundang-undangan dimaksud kepada para stake holder (pemangku kepentingan).</p> <p>3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melengkapi peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada masing-masing kementerian yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah, atau peraturan di bawahnya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan seluruh peraturan turunan yang telah ditetapkan di masing-masing kementerian.</p> <p>4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan koordinasi antar kementerian dalam rangka harmonisasi serta mencegah terjadinya tumpang tindih norma, standar, prosedur dan kewenangan antar sektor terkait Peraturan Menteri, Keputusan Menteri serta peraturan turunan di masing-masing kementerian.</p> <p>5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>melakukan sosialisasi dan pelatihan secara intensif untuk program-program berbasis kemasyarakatan di masing-masing kementerian dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan insentif berupa program dan kegiatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat, serta insentif berupa kemudahan perizinan bagi pelaku usaha, yang telah menjaga kelestarian kawasan hutan, kelestarian kawasan konservasi kelautan dan perikanan, serta keberadaan lahan pertanian.</p> <p>7. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk fokus dalam melakukan proses penegakan hukum atas kasus tindak kejahatan penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural, tidak sesuai peruntukan, dan/atau tidak sesuai dengan tata ruangnya sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pengawalan terhadap seluruh proses penegakan hukum sampai adanya keputusan inkrah terhadap kasus tersebut.</p> <p>8. Komisi IV DPR RI sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Pencemaran Sampah dan Limbah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan atas implementasi Undang-Undang</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.</p> <p>4. Komisi IV DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Jambi, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Bupati Jombang pada tanggal 22 Maret 2021, guna membahas Pencemaran Sampah dan Limbah. Beberapa poin penting dalam rapat tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan sosialisasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama kepada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.</li> <li>b. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah ditingkat Provinsi maupun pemerintah ditingkat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pengawasan secara periodik, pembinaan serta pemberian sanksi terhadap perusahaan-perusahaan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan kewenangannya.</li> <li>c. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal</li> </ol>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat dan berkesinambungan kepada seluruh perusahaan dan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan sampah dan/atau limbah non bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3, sesuai peraturan perundang-undangan dan tanpa tebang pilih.</p> <p>d. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) atas dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya dilakukan proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mengambil langkah-langkah progresif dengan pendekatan multi-door dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran sampah dan limbah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Kehutanan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sampai ada putusan inkrah serta pelaksanaan putusan kasus tersebut.</p> <p>f. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membangun sistem informasi yang terbuka terkait pengelolaan limbah oleh industri, sehingga seluruh pemangku kepentingan mengetahui informasi secara cepat dan tepat terkait pengelolaan limbah industri, dalam rangka melakukan pengawasan yang menjadi tanggung jawab bersama.</p> <p>g. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan Data Nama-nama Perusahaan Penghasil Limbah B3 Slag Alumunium di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>h. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT. Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton di Kabupaten Probolinggo, serta perusahaan-perusahaan penghasil limbah B3 Slag Alumunium di Kabupaten Jombang untuk mendapatkan informasi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Tindak lanjut kegiatan pengolahan limbah yang dihasilkan akibat kegiatan operasional pabrik dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang terjadi;</li> <li>ii. Tindak lanjut penyelesaian permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat terdampak pencemaran di sekitar lokasi pabrik; dan</li> </ul>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>iii. Tindak lanjut terkait pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat di sekitar lokasi industri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>
5.	<b>KOMISI V</b>	<p>1. Pada 10 Maret 2021, RDPU dengan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) membahas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Proyeksi sampai dengan Tahun 2024, dengan poin penting sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komisi V DPR RI mendukung langkah-langkah LPJK dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur antara lain dengan mempermudah perizinan berusaha; memperkuat rantai pasok; meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas tender; serta mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).</li> <li>2) Komisi V DPR RI meminta LPJK untuk melakukan analisis dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Kementerian PUPR untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, antara lain kegagalan bangunan, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur dan penetapan pemenang nilai penawaran/tender yang tidak wajar.</li> </ol> <p>2. Pada 15 – 17 Maret 2021, raker dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (15/03), Menteri Perhubungan (16/03), dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (17/03), guna membahas Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2020,</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Refocusing Program/Kegiatan TA 2021 dan sejumlah isu terkait masing-masing Mitra Kerja di tahun 2021.</p> <p>Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Mitra Kerja Komisi V DPR RI atas keberhasilan capaian capaian Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I (Hapsem) tahun 2020. Namun, Komisi V DPR RI meminta mitra kerja untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah-langkah konkret agar temuan-temuan dalam Hapsem I BPK Tahun 2020 tidak terulang kembali. Selain itu, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan disoroti oleh komisi untuk dilakukan pemerintah, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terhadap Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengintegrasikan dan mensinkronisasikan roadmap pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan program/kegiatan antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa) sehingga sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi dapat tercapai</li> <li>b. Meningkatkan upaya pengawasan penggunaan dana desa, antara lain meningkatkan peran pengawasan inspektorat, melakukan evaluasi, dan membuat skema sistem pengawasan terhadap penggunaan dana desa</li> <li>c. Melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP); serta</li> </ol> </li> </ol>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>d. Segera melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang berwenang terkait dugaan adanya desa fiktif.</p> <p>2) Terhadap Kementerian Perhubungan</p> <p>a. Terkait dengan program transportasi nasional di masa pandemi dan kesiapan transportasi arus mudik lebaran 2021, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar memperhatikan isu-isu strategis terkait keselamatan, keamanan dan kualitas pelayanan, antara lain:</p> <p>a) Antisipasi lonjakan pergerakan penumpang dan konsistensi pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan;</p> <p>b) Pengawasan kelaikan sarana dan transportasi berupa inspeksi terhadap personil, rampcheck sarana transportasi, ketersediaan peralatan keselamatan, dan SOP Pelayanan/ keselamatan;</p> <p>c) Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penyediaan fasilitas alat test Covid-19 yang terjangkau dan akurat di setiap simpul transportasi;</p> <p>d) Mendorong penggunaan GeNose Test Covid-19 di setiap simpul transportasi massal dan berkoordinasi dengan Instansi terkait; serta</p> <p>e) Meningkatkan pantauan kondisi cuaca dan antisipasi bencana alam.</p> <p>3) Terhadap Kementerian Perhubungan:</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>a) Meminta untuk memperhatikan isu-isu strategis pembangunan infrastruktur, antara lain: Peningkatan kualitas Jalan Nasional dan Jalan Tol; Revitalisasi irigasi dan bendungan demi mendukung ketahanan pangan; Transparansi dan akuntabilitas tender; dan Percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur pasca bencana.</p> <p>b) Melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur program dan kegiatan infrastruktur yang berbasis masyarakat di lingkup Kementerian PUPR sesuai dengan usulan dan masukan Komisi V DPR RI.</p> <p>3. Komisi V DPR RI masih belum melakukan pembahasan RUU Jalan, karena masih menunggu Hasil Keputusan Rapat Bamus yang membicarakan Surat Presiden perihal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>
6.	<b>KOMISI VI</b>	<p>1. 15 Maret 2021: RDP Komisi VI DPR RI bersama Eselon I Kementerian Perdagangan dalam Pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga dan Pembahasan rencana kerja dan anggaran Rencana (kegiatan penggunaan anggaran Tahun 2021)</p> <p>2. 15 Maret 2021: RDP Komisi VI DPR RI bersama Eselon I Kementerian Perindustrian dalam Pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga dan Pembahasan rencana kerja dan anggaran Rencana (kegiatan penggunaan anggaran Tahun 2021)</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 16 Maret 2021: RDP Komisi VI DPR RI bersama Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM dalam Pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga dan Pembahasan rencana kerja dan anggaran Rencana (kegiatan penggunaan anggaran Tahun 2021)</li> <li>4. 16 Maret 2021 RDP Komisi VI DPR RI bersama Eselon I BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dalam Pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga dan Pembahasan rencana kerja dan anggaran Rencana (kegiatan penggunaan anggaran Tahun 2021)</li> <li>5. 8 s/d 19 Maret 2021 melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Kementerian BUMN beserta BUMN terkait Pembentukan Ekosistem Ultra Mikro dalam Pelaksanaan Keuangan Negara dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah (Penyampaian rencana pembentukan ekosistem ultra mikro dengan Mitra Kerja BUMN terkait (BRI, PNM dan Pegadaian))</li> </ol>
7.	<b>KOMISI VII</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsinyering pembahasan penyempurnaan dan penyisiran draft RUU EBT di Griya Saba Kopo yang dihadiri oleh Pimpinan Komisi VII, Kepala BKD, Sekretariat Komisi VII, Tenaga Ahli Komisi VII dan Tim EBT BKD DPR RI.</li> <li>2. Kunjungan Kerja Panja Migas ke Blok Rokan Provinsi Riau bersama Gubernur Provinsi Riau, Dirjen Migas KESDM RI, Ketua Harian LAM Riau, Kesultanan Siak, Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina (Persero), CEO Sub Holding Upstream PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Ketua DPRD Provinsi Riau, Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia dengan kegiatan melihat langsung dan menjaring informasi teknis terkait progres peralihan Blok Rokan dan progres pipanisasi Blok Rokan.</li> </ol>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>3. Rapat Audiensi dengan DPRD Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan membahas masalah royalti dan perjanjian kontrak kerjasama pertambangan di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p>4. Rapat Diplomasi dengan Kedutaan Amerika (Economic Counsellor, Energy Officer, S&amp;T Officer, Energy Specialist dan Economic Assistant) membahas courtesy call terkait kerjasama bilateral di bidang energi serta riset dan teknologi energi.</p> <p>5. RDP dengan Kepala BPH Migas membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penjelasan posisi terkini terkait konsesi ruas transmisi gas bumi Cirebon Semarang.</li> <li>b. Solusi agar pembangunan pipa gas bumi Cirebon Semarang dapat terlaksana sesuai target.</li> <li>c. Proses penentuan pelaksana pembangunan pipa gas bumi Cirebon Semarang.</li> <li>d. Penjelasan jumlah dan lokasi program BBM satu harga di seluruh Indonesia Tahun 2021.</li> </ul> <p>6. RDP dengan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM RI membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kontribusi Badan Geologi dalam mitigasi bencana geologi.</li> <li>b. Sosialisasi potensi bencana geologi.</li> </ul> <p>7. Rapat Kerja dengan Menteri ESDM/Ketua Harian DEN dan Anggota DEN dari unsur Pemerintah, serta unsur pemangku kepentingan membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Kerja DEN Tahun 2021.</li> <li>b. Rencana program strategis DEN Tahun 2021-2025.</li> </ul>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>8. RDP dengan Dirjen EBTKE, dengan menghadirkan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) Mandailing Natal membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan hasil re-investigasi kejadian kebocoran pipa di PT SMGP.</li> <li>b. Tindak lanjut hasil rekomendasi Komisi VII DPR RI</li> </ol>
8.	<b>KOMISI VIII</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat internal Panja RUU tentang Penanggulangan Bencana (9 Maret 2021).</li> <li>2. Kunker dalam rangka mencari masukan terhadap RUU tentang Penanggulangan Bencana (10-12 Maret 2021)</li> <li>3. RUU Kesejahteraan Lanjut Usia masih menunggu proses harmonisasi dan sinkronisasi di Baleg.</li> <li>4. Rapat Internal Panja BPIH Tahun 1442 H/ 2021 M untuk membahas jadwal dan program kerja (9 Maret 2021).</li> <li>5. Rapat Internal Komisi untuk membahas jadwal dan program kerja terkait fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan APBN (8 Maret 2021).</li> <li>6. Rapat Pimpinan membahas jadwal dan program kerja terkait fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan APBN (8 Maret 2021).</li> </ol>
9.	<b>KOMISI IX</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Tim Asistensi melakukan finalisasi draf RUU berdasarkan masukan pemangku kepentingan.</li> <li>2. Raker, RDP, dan RDPU dengan Menteri Kesehatan, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN, Kepala BPOM, Direktur Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, dan Tim Peneliti RSUP</li> </ol>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Kariadi Semarang untuk meminta penjelasan tentang dukungan Pemerintah terhadap Pengembangan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara (10 Maret 2021).</p> <p>3. Raker dan RDP dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kepala BPOM, Dirut PT Biofarma, Kadin, dan Apindo untuk meminta penjelasan tentang: evaluasi upaya Ppnanggulangan Covid-19 selama 1 tahun terakhir, perkembangan pelaksanaan vaksinasi program dan skema vaksinasi gotong-royong, termasuk kesiapan sistem informasi satu data fasilitas kesehatan, serta ketersediaan vaksin dan Vaksin Gotong Royong (15 Maret 2021).</p> <p>4. Raker dan RDP dengan Menteri Ketenagakerjaan, Kepala BP2MI, Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan PMO tentang Grand Desain Kemnaker RI dan Bappenas dalam Penciptaan dan Pemenuhan Pasar Kerja Tahun 2021 pada masa Pandemi Covid 19; sinergitas Kemenaker RI dengan lintas Kementerian terkait perlindungan, pemulangan dan pemberdayaan PMI sebagai dampak pandemi Covid-19; pPembahasan Program Kartu Prakerja; dan kebijakan Kemnaker terkait pengupahan pascaterbitnya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.</p> <p>5. Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan DJSN, Direksi BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk meminta pPenjelasan tentang peningkatan kualitas pelayanan kesehatan JKN pada masa pandemi; perkembangan penyusunan kebijakan kelas standar dan pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>implikasinya terhadap sistem pembiayaan INA CBGs dan kapitasi; serta penyelesaian klaim bayi baru lahir dan surplus Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan tahun 2020 (17 Maret 2021).</p> <p>6. Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat (Sukabumi), dan Provinsi NTB (Lombok) tentang Evaluasi Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Program Kartu Prakerja kepada pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 (18-20 Maret 2021).</p>
10.	<b>KOMISI X</b>	<p>1. Menyusun Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Draf RUU sudah dikirimkan ke Baleg pada MP II TS 2020-2021 untuk dilakukan Harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan konsep RUU. Menunggu penjadwalan oleh Baleg untuk dilakukan harmonisasi, sinkronisasi dan pembulatan konsep RUU</p> <p>2. Mendapatkan penugasan dari Pimpinan DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU Tentang Praktik Psikologi berdasarkan surat Pimpinan DPR RI Nomor: PW/00074/DPRRI/I/2021, tertanggal 19 Januari 2021. Akan diagendakan Raker pertama pada tanggal 22 Maret 2021 dengan Kementerian sesuai Surpres.</p> <p>3. Pertemuan dengan Kemendikbud RI membahas tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Panja PJP Komisi X DPR RI telah menyelesaikan kerjanya pada MP III TS 2020-2021 dan telah menyampaikan rekomendasi Panja kepada Kemendikbud RI pada Raker tanggal 10</li> </ul>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Maret 2021. Beberapa isu krusial yang menjadi rekomendasi Panja PJP Komisi X DPR RI, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peta Jalan Pendidikan yang saat ini disusun oleh Kemendikbud RI belum dapat dikatakan sebagai konsep peta jalan pendidikan melainkan masih pada tataran pra konsep. Selain itu Peta Jalan Pendidikan belum disertai kajian akademik, sehingga perlu dilakukan perubahan secara fundamental setidaknya meliputi 6 aspek, yaitu filosofis, yuridis, sosiologis, prosedur kebijakan dan tata kelola pendidikan, anggaran, dan keterlibatan masyarakat</li> <li>b. Peta Jalan Pendidikan yang saat ini disusun oleh Kemendikbud RI belum sejalan dengan visi negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi.</li> <li>c. Peta Jalan Pendidikan yang saat ini disusun oleh Kemendikbud RI belum melibatkan pemangku kepentingan Pendidikan, antara lain lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, organisasi keagamaan, organisasi profesi pendidikan, lembaga bidang kebudayaan, organisasi pelajar dan mahasiswa, tokoh pendidikan, tokoh agama dan budayawan.</li> </ol> <p>4. Pertemuan dengan Kemendikbud RI membahas tentang Panja PGTKH-ASN Komisi X DPR RI pada tanggal 15-17 Maret 2021 telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Barat, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa temuan krusial dalam kunjungan tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Temuan Khusus:</b> Pemerintah Kabupaten Bekasi pada awalnya telah mengajukan usulan formasi Guru untuk mengikuti seleksi program 1 juta Guru PPPK pada tahun 2021 sebanyak 8000, jumlah tersebut diusulkan sesuai kebutuhan guru di Kabupaten Bekasi. Namun Pemerintah Kabupaten Bekasi pada akhirnya hanya mengusulkan 516 formasi. Hal ini dikarenakan adanya permintaan dari Kemenpan RB RI agar Pemda Bekasi berkomitmen untuk dapat/sanggup mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk gaji guru PPPK hasil seleksi program 1 juta guru PPPK.</li> <li>2) <b>Temuan Umum</b> di Kab. Bekasi, Kab. Sragen, dan Kab. Banyuasin: Koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah terkait persiapan pelaksanaan program 1 juta guru PPPK belum berjalan baik, khususnya pada sosialisasi program, modul pembelajaran, pengusulan formasi kebutuhan dan sumber pembiayaan gaji bagi guru yang lulus seleksi menjadi guru PPPK.</li> </ol>
11.	<b>KOMISI XI</b>	<p>1. Komisi XI DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan tanggal 15 Maret 2021 membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokkan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Beberapa hal yang menjadi pembahasan antara lain:</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN																																						
		<p>1) Perubahan tarif PPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dan Hybrid Electric Vehicle (HEV) sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="797 408 1823 951"> <thead> <tr> <th data-bbox="797 408 1279 563" rowspan="2">Jenis Teknologi Kendaraan</th> <th data-bbox="1279 408 1503 563" rowspan="2">Tarif sesuai PP 73/2019</th> <th colspan="2" data-bbox="1503 408 1823 488">Usulan Perubahan</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1503 488 1644 563">Skema I</th> <th data-bbox="1644 488 1823 563">Skema II</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="797 563 1279 603">KBLBB / BEV</td> <td data-bbox="1279 563 1503 603">0%</td> <td data-bbox="1503 563 1644 603">0%</td> <td data-bbox="1644 563 1823 603">0%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="797 603 1279 643">PHEV</td> <td data-bbox="1279 603 1503 643">0%</td> <td data-bbox="1503 603 1644 643">5%</td> <td data-bbox="1644 603 1823 643">8%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="797 643 1279 683">FHEV (Emisi CO2 &lt; 100)</td> <td data-bbox="1279 643 1503 683">2%</td> <td data-bbox="1503 643 1644 683">6%</td> <td data-bbox="1644 643 1823 683">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="797 683 1279 722">FHEV (Emisi CO2 100 -125)</td> <td data-bbox="1279 683 1503 722">5%</td> <td data-bbox="1503 683 1644 722">7%</td> <td data-bbox="1644 683 1823 722">11%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="797 722 1279 802">FHEV (Emisi CO2 &gt; 125-150)</td> <td data-bbox="1279 722 1503 802">8%</td> <td data-bbox="1503 722 1644 802">8%</td> <td data-bbox="1644 722 1823 802">12%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="797 802 1279 842">MHEV (Emisi CO2 &lt; 100)</td> <td data-bbox="1279 802 1503 842">8%</td> <td data-bbox="1503 802 1644 842">8%</td> <td data-bbox="1644 802 1823 842">12%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="797 842 1279 882">MHEV (Emisi CO2 100 -125)</td> <td data-bbox="1279 842 1503 882">10%</td> <td data-bbox="1503 842 1644 882">10%</td> <td data-bbox="1644 842 1823 882">13%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="797 882 1279 962">MHEV (Emisi CO2 &gt; 125-150)</td> <td data-bbox="1279 882 1503 962">12%</td> <td data-bbox="1503 882 1644 962">12%</td> <td data-bbox="1644 882 1823 962">14%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Prakondisi penerapan Skema II adalah 2 (dua) tahun setelah adanya investasi yang signifikan di produk mobil <i>Battery Electric Vehicle</i> (BEV) atau saat mulai BEV berproduksi komersial dengan realisasi investasi yang signifikan, di mana periode tersebut digunakan untuk penyiapan rantai suplai agar dapat memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) untuk Transportasi Jalan.</p>	Jenis Teknologi Kendaraan	Tarif sesuai PP 73/2019	Usulan Perubahan		Skema I	Skema II	KBLBB / BEV	0%	0%	0%	PHEV	0%	5%	8%	FHEV (Emisi CO2 < 100)	2%	6%	10%	FHEV (Emisi CO2 100 -125)	5%	7%	11%	FHEV (Emisi CO2 > 125-150)	8%	8%	12%	MHEV (Emisi CO2 < 100)	8%	8%	12%	MHEV (Emisi CO2 100 -125)	10%	10%	13%	MHEV (Emisi CO2 > 125-150)	12%	12%	14%
Jenis Teknologi Kendaraan	Tarif sesuai PP 73/2019	Usulan Perubahan																																						
		Skema I	Skema II																																					
KBLBB / BEV	0%	0%	0%																																					
PHEV	0%	5%	8%																																					
FHEV (Emisi CO2 < 100)	2%	6%	10%																																					
FHEV (Emisi CO2 100 -125)	5%	7%	11%																																					
FHEV (Emisi CO2 > 125-150)	8%	8%	12%																																					
MHEV (Emisi CO2 < 100)	8%	8%	12%																																					
MHEV (Emisi CO2 100 -125)	10%	10%	13%																																					
MHEV (Emisi CO2 > 125-150)	12%	12%	14%																																					

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>3) Menteri Keuangan agar memastikan pelaksanaan kebijakan PPnBM tetap memperhatikan asas keadilan pembebanan pajak, pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah, percepatan transformasi ekonomi, dan mengamankan penerimaan negara.</p> <p>2. Komisi XI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. BRI (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani tanggal 16 Maret 2021 yang membahas pembentukan <i>holding ultra mikro</i>. Beberapa poin yang menjadi pembahasan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komisi XI telah mendengarkan penjelasan Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Direktur Utama PT. Pegadaian (Persero), dan Direktur Utama PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) mengenai pembentukan <i> Holding Ultra Mikro</i>.</li> <li>- Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Direktur Utama PT. Pegadaian (Persero), dan Direktur Utama PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) agar menyampaikan dokumen terkait pembentukan <i> Holding Ultra Mikro</i> dan <i> Key Performance Indicators</i> yang meliputi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penigkatan profitabilitas.</li> <li>b. Efisiensi bisnis.</li> <li>c. Sinergitas 3 (tiga) BUMN.</li> <li>d. Penurunan cost of fund.</li> <li>e. Penciptaan lapangan pekerjaan.</li> </ul> </li> </ul>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Kemudahan akses layanan keuangan.</li> <li>g. Target capaian kinerja keuangan holding dan anak perusahaan.</li> <li>h. Dalam menjaga iklim usaha yang kondusif.</li> </ul> <p>- Dalam mengembangkan ekosistem ultra mikro, Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Direktur Utama PT. Pegadaian (Persero), dan Direktur Utama PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) berkomitmen untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan layanan produk yang lengkap dan pendanaan yang lebih murah untuk 29 juta usaha UMi di tahun 2024.</li> <li>b. Mempertahankan proses bisnis, budaya, serta peran dari Pegadaian dan PNM.</li> <li>c. Tidak menyebabkan pemutusan hubungan kerja di Pegadaian dan PNM.</li> <li>d. Peningkatan profitabilitas yang berdampak positif kepada nasabah.</li> <li>e. PT. BRI (Persero) Tbk mendukung kebutuhan permodalan untuk Pegadaian dan PNM</li> </ul> <p>3. Komisi XI melakukan Rapat Panja Penerimaan Pajak dan Rapat Panja Industri Jasa Keuangan Komisi XI DPR RI membahas pendalaman mengenal Perpajakan dan pembahasan terkait Industri Jasa Keuangan tanggal 18 Maret 2021. Beberapa hal yang menjadi pembahasan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Panja Penerimaan Pajak Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan melakukan pendalaman terkait Penerimaan Pajak.</li> </ul>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>b. Panja Penerimaan Pajak Komisi XI DPR RI meminta data-data kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan akan dibahas dalam pembahasan Panja Penerimaan Pajak pada hari Senin, 22 Maret 2021.</p> <p>c. Pembahasan Panja Industri Jasa Keuangan ditunda karena tidak mencapai kuorum dan akan dilakukan pembahasan kembali pada hari senin, 22 Maret 2021.</p>
12.	<b>BADAN LEGISLASI (BALEG)</b>	<p>1. Rapat internal Baleg terkait pengesahan rancangan jadwal kegiatan Baleg MP IV TS 2020-2021 dapat dilaksanakan dengan catatan jadwal acara rapat bersifat fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>Jadwal acara rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan ini akan diisi dengan kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyempurnaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 yang telah diputuskan dlm Raker tgl 14 Jan 2021; dan</li> <li>2) Penyusunan RUU usul Baleg;</li> <li>3) Pengharmonisasian RUU usul Anggota/Komisi;</li> <li>4) Pemantauan dan peninjauan UU;</li> <li>5) Lain-lain.</li> </ol> <p>2. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum &amp; HAM dan PPUU DPD RI dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2020-2024 menyetujui untuk menyepakati:</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. RUU tentang Pemilihan Umum ditarik dari daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan digantikan dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diusulkan oleh Pemerintah.</li> <li>b. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol yang semula diusulkan oleh Anggota DPR menjadi usulan Badan Legislasi.</li> <li>c. Jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) RUU.</li> <li>d. Jumlah Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) RUU.</li> </ul> <p>3. Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri PAN-RB, dan Menteri KKP agenda mendengarkan pandangan/masukan dari Pemerintah atas pelaksanaan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyetujui untuk menyepakati :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pangan merupakan kebutuhan strategis suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia, untuk itu wajib dibentuk Lembaga pangan nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan;</li> <li>b. Selanjutnya Badan Legislasi DPR RI akan melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Secara berkala untuk memastikan terbentuknya lembaga pangan nasional</li> </ul> <p>4. RDP dengan Dirut Perum Bulog dan Kepala BPS terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mendukung Bulog menjadi Badan Ketahanan Pangan dan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>mengembalikan fungsi Bulog seperti semula, yaitu sebagai regulator dan operator dan bertanggungjawab kepada Presiden.</p> <p>5. Kunker Tim Pemantauan dan Peninjauan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan ke Sulawesi Selatan dan Sumatra Selatan. Dalam rangka mengoptimalkan tercapainya ketahanan pangan nasional di Sulawesi Selatan dan Sumatra Selatan, perlu ada dukungan dari DPR RI dan Pemerintah Pusat terkait permasalahan yang dihadapi petani diantaranya masalah bibit dan pupuk yang sulit didapatkan dan harga jual yang jatuh dan irigasi sawah yang masih kurang.</p>
13.	<b>BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)</b>	<p>1. Tanggal 9 Maret 2021, Rapat Intern dengan agenda: Penetapan Jadwal Kegiatan BURT MS 4 TS 2020-2021</p> <p>2. Tanggal 10 Maret 2021, Rapat Panja BURT dengan agenda: Revisi AKUPA DPR RI Tahun 2021 dan Penyusunan AKUPA DPR RI Tahun 2022.</p> <p>Penyesuaian nomenklatur program anggaran DPR RI semula 4 program menjadi 2 program.</p> <p>3. Tanggal 15 Maret 2021, Rapat Panja BURT dengan agenda: Realisasi Anggaran DPR RI Satker Dewan Triwulan IV Tahun 2020 dan Realisasi Anggaran DPR RI Satker Setjen Triwulan IV Tahun 2020.</p> <p>Realisasi Anggaran DPR RI sampai akhir Triwulan IV Tahun 2020 sebesar 94,72% dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satker Dewan 93,81%</li> <li>b. Satker Setjen 97,45%</li> </ul>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		4. Tanggal 16-18 Maret 2020, Kunjungan Kerja dalam rangka pengawasan pelayanan Protokol di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh.
14.	<b>BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsinyering pengumpulan data awal terkait kajian tematik BAKN atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (12-14 Maret 2021).</li> <li>2. Kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memperoleh masukan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas penelaahan BAKN DPR RI terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (15-17 Maret 2021).</li> <li>3. Kunjungan kerja ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangka memperoleh masukan dari akademisi UGM atas penelaahan BAKN DPR RI terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (18-20 Maret 2021).</li> </ol>
15.	<b>BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)</b>	<p><b>3 Maret 2021</b> - BKSAP Day ke Sumatera Selatan</p> <p>BKSAP DPR RI menggelar kegiatan BKSAP Day bekerja sama dengan Pemprov Sumatera Selatan, di Palembang untuk mensosialisasikan kegiatan BKSAP.</p> <p>Pada diskusi yang juga diikuti sivitas akademika Universitas Sriwijaya dan Universitas Muhammadiyah Palembang tersebut, muncul beberapa isu yang menjadi perhatian bersama untuk kemajuan Sumsel antara lain pariwisata, kerja sama antar universitas, infrastruktur dan produksi karet.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p><b>4 Maret 2021</b> - BKSAP Day ke Bandung, Jawa Barat</p> <p>Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar kegiatan Sosialisasi Diplomasi Parlemen BKSAP Day dengan tema “Diplomasi Parlemen DPR RI di masa COVID-19” di Bandung, Jawa Barat.</p> <p>Dalam dialog dengan Wakil Walikota Bandung, H. Yana Mulyana, SE., M.M. beserta jajaran, dan sivitas akademika Universitas Pasundan dibahas tentang diplomasi parlemen di masa COVID-19, upaya membangun komunikasi yang efektif, peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM di tengah masyarakat Kota Bandung dalam kondisi pandemi, serta bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 yang dicanangkan Pemerintah.</p> <p><b>8 Maret 2021</b> - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri undangan diskusi secara daring dengan Amnesty International Indonesia.</p> <p>Dalam diskusi, dibahas tentang peran dan langkah strategis Indonesia dalam upaya mencari alternatif penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar.</p> <p><b>(8 Maret 2021) Rapat Pleno dan Rapim BKSAP</b></p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>BKSAP melakukan rapat pleno untuk pelantikan pimpinan BKSAP dari FPDIP, Sihar Sitorus menggantikan Charles Honoris dilanjutkan rapat pimpinan BKSAP untuk membahas program kegiatan BKSAP dalam masa persidangan IV</p> <p><b>9 Maret 2021</b> - BKSAP Day ke Tangerang Selatan</p> <p>BKSAP DPR RI siap membantu memfasilitasi pengembangan kerja sama antara universitas-universitas di Kota Tangerang Selatan dengan pihak-pihak terkait di luar negeri dalam kapasitasnya sebagai pelaksana peran diplomasi parlemen.</p> <p><b>(9 Maret 2021) Working Dinner GKSB DPR RI – Parlemen Korsel dengan Dubes Korsel, Mr. Park Tae-sung</b></p> <p>Topik pembahasan dalam <i>working dinner</i> tersebut adalah <i>Special Strategic Partnership</i> antara Indonesia - Korea Selatan yang meliputi bidang pertahanan dan hubungan luar negeri, perdagangan bilateral dan pembangunan infrastruktur, people to people exchanges, dan kerja sama regional dan global. Indonesia menjadi satu-satunya mitra Korea Selatan dengan status tersebut di ASEAN.</p> <p>GKSB DPR RI - Parlemen Korea Selatan juga membahas perlunya penguatan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang pertanian. Hal tersebut disambut baik oleh pihak Korea Selatan yang menyatakan siap untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertanian dan pengembangan pangan melalui <i>sharing knowledge</i> terkait kebijakan di bidang pertanian dan</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>penggunaan teknologi sistem informasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian.</p> <p><b>10 Maret 2021</b></p> <p>Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar <i>Focus Group Discussion</i> dengan tema “Berkaca pada Interaksi antara Parlemen dan Lembaga Anti Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi” bekerjasama dengan <i>Westminster Forum for Democracy</i> (WFD) dan <i>Global Organization of Parliamentarians Against Corruption</i> (GOPAC) pada Rabu, 10 Maret 2021 di Bogor, Jawa Barat.</p> <p>Ketua BKSAP menyebutkan perjuangan memberantas korupsi membutuhkan berbagai variabel, seperti kebijakan, <i>rule of law</i>, mekanisme pengaturan hubungan antara badan anti korupsi, lembaga yg membentuknya dan parlemen.</p> <p>Direktur untuk Asia dan Amerika WFD, Mantan Duta Besar Inggris untuk Paraguay dan Wakil Duta Besar untuk Myanmar, Amb. Matthew Hedges, menjelaskan kemitraan dengan Para Anggota Parlemen dalam pemberantasan korupsi di bawah GOPAC sangat krusial untuk memastikan bahwa lembaga anti-korupsi mendapatkan dukungan kerangka hukum yg kuat dan anggaran yg memadai, serta berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar dapat berkinerja dg baik, independen, dan akuntabel.</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Panelis pertama, Franklin De Vrieze, WFD <i>Senior Governance Advisor</i>, memaparkan fakta hasil penilaian terhadap 150 lembaga anti-korupsi di lebih dari 100 negara, dimana masih terdapat kendala dalam memastikan efektivitas lembaga anti-korupsi yang terkait sisi eksternal seperti political will, tidak cukupnya rule of law dan sistem peradilan.</p> <p>Panelis kedua Johan Budi Sapto Pribowo, Anggota Komisi III dan BKSAP, menjelaskan peran Komisi III DPR saat ini yang memiliki prioritas desain hukum ke depan. Road Map Legislasi dengan fokus pada RUU KUHP, RUU KUHAP, RUU PAS dan RUU Kelembagaan menjadi upaya yg dilakukan Komisi III untuk merevisi UU KUHP dengan tujuan memperbaiki pidana materiil di bidang korupsi.</p> <p>Panelis ketiga, Alvin Lie, Komisioner Ombudsman RI Periode 2016-2021, menekankan pentingnya independensi lembaga anti-korupsi agar dapat bekerja secara efektif. Panelis keempat, Dr. Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK RI menyampaikan catatan dari perspektif lembaga anti-korupsi agar DPR dapat berperan secara makro untuk mengubah perilaku koruptif.</p> <p><b>(10 Maret 2021) Pertemuan dengan Wakil Dubes Ukraina, Mr. Oleksandr Bondarenko</b></p> <p>Ukraina memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang penting di kawasan Asia Tenggara. Hal ini ditandai dengan volume perdagangan antara kedua negara yang cukup signifikan, serta saling mendukung antara kedua negara dalam berbagai isu internasional di PBB. Ukraina merupakan salah satu negara yang aktif mendukung Ketetuaan Indonesia di Inisiatif Vaksin Global WHO</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>COVAX. Sedangkan Indonesia merupakan salah satu negara yang konsisten mendukung Ukraina dalam menyelesaikan konflik melalui cara damai dengan tetap menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina.</p> <p>Dalam kesempatan pertemuan tersebut <i>Charge D' Affaires</i> Ukraina juga menyampaikan keinginan Ukraina untuk dapat menjadi Observer di Organisasi Parlemen ASEAN, yaitu ASEAN <i>Inter-Parliamentary Assembly</i> (AIPA).</p> <p>Ukraina mengharapkan kiranya DPR dapat menjembatani komunikasi dengan Kemenkeu untuk mengeluarkan Ukraina dari daftar salah satu negara yang berisiko dalam perdagangan.</p> <p><b>(10 Maret 2021) Rapat GKSB DPR RI – Parlemen Turki dengan jajaran KBRI Ankara dan KBRI Istanbul</b></p> <p>Dalam rapat tersebut GKSB DPR RI - Parlemen Turki membahas program kegiatannya bersama Dubes RI untuk Turki dan jajarannya sebagai pelaksanaan fungsi diplomasi yang menjadi amanatnya.</p> <p>Dubes LBBP RI untuk Turki menyampaikan dukungan penuh bagi pelaksanaan diplomasi parlemen yang dilakukan oleh GKSB DPR RI - Parlemen Turki.</p> <p><b>(15 – 21 Maret 2021)</b></p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang diketuai oleh Bapak Ir. H. A. Hafisz Tohir bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Y.M. Yevhen Yenin beserta jajarannya dalam rangka mempererat hubungan bilateral kedua negara. Dalam sambutannya Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina menyambut baik kunjungan Delegasi BKSAP DPR RI dan menyampaikan bahwa Indonesia adalah mitra strategis bagi Ukraina di wilayah Asia Tenggara. Berbagai kerjasama yang telah berlangsung dengan baik diantara kedua negara diharapkan akan semakin berkembang di masa yang akan datang.</p> <p>Menanggapi sambutan tersebut Ketua Delegasi BKSAP DPR RI menjelaskan bahwa Diplomasi Parlemen yang dilakukan oleh BKSAP sejatinya adalah untuk memperkuat Diplomasi Pemerintah RI sekaligus untuk memantau bagaimana kerjasama bilateral antara kedua negara telah berjalan selama ini.</p> <p>Disamping bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Delegasi BKSAP DPR RI juga bertemu dengan Parlemen Ukraina (Verkhovna Rada) yang diwakili oleh Ketua Komisi Luar Negeri Oleksandr Merezhko dan Ketua KSAP Artem Kunaev. Dalam pertemuan dengan Parlemen Ukraina yang berlangsung konstruktif tersebut, Merezhko dan Kunaev menyampaikan perlunya dukungan DPR RI bagi Parlemen Ukraina yang ingin menjadi negara observer di organisasi Parlemen ASEAN (AIPA).</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>Delegasi juga berkesempatan untuk bertemu dengan <i>National Anti-Corruption Body of Ukraine</i> (NABU), untuk berdiskusi mengenai pentingnya dukungan Parlemen dalam upaya pemberantasan korupsi serta bagaimana Parlemen di seluruh dunia dapat berkontribusi secara aktif mendukung agenda pemberantasan korupsi global melalui <i>Global Organization of Parliamentarians Against Corruption</i>.</p> <p><b>16 Maret 2021 - IPU UN ESCAP Webinar for the Asia Pacific region Parliaments</b></p> <p>Webinar bertema <i>Building a better future where nobody is left behind: How can parliaments ensure that COVID-19 recovery strategies are in line with the SDGs?</i>, anggota parlemen dari 55 negara anggota ESCAP melakukan dialog dan bertukar pikiran mengenai inovasi-inovasi yang dilakukan dalam mencapai SDGs di tengah situasi tidak menentu akibat krisis kesehatan yang berkembang menjadi krisis multidimensional. BKSAP DPR RI dalam kesempatan ini kembali menegaskan komitmen DPR untuk mendukung visi <i>green growth</i> sebagai arah kebijakan pembangunan ke depan. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada manusia tetapi juga mempertimbangkan aspek lingkungan. Hal ini akan menjadi semakin signifikan karena berbagai negara akan bertemu bulan Oktober tahun ini untuk membahas perubahan iklim. Forum membahas juga mengenai pelibatan parlemen dalam <i>Voluntary National Review</i> (VNR) SDGs dan <i>best practices</i> negara-negara menyiapkan VNR di tengah pandemi. Tahun ini merupakan kali ketiga Indonesia mengajukan VNR</p>

NO.	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
		<p>di High-Level Political Forum (HLPF) PBB. Indonesia adalah satu dari 9 negara di dunia yang mengajukan VNR untuk ketigakalinya.</p> <p><b>(17 Maret 2021) Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Turki</b></p> <p>Dalam rapat tersebut GKSB DPR RI – Parlemen Turki membahas tentatif program yang akan dilakukan selama kunjungan ke Ankara dan Istanbul. Ada 5 institusi selain Parlemen Turki yang menjadi tujuan kunjungan, yaitu: <i>The Union of Chambers and Commodity Exchange of Turkey (TOBB); Turkish Aerospace Industry; Turkish Radio and Television (TRT), Ministry of Health, dan Ministry of Industry and Technology.</i> Turkish Aerospace Industry dan TOBB telah disetujui oleh Ketua dan Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Turki.</p>
16.	<b>MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kegiatan konsinyering dalam rangka persiapan Seminar Nasional yang dilaksanakan tanggal 22 Maret 2021.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan Seminar Nasional pada tanggal 22 Maret 2021 yang dibuka oleh Pimpinan DPR RI dan dihadiri oleh Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi seluruh Indonesia, Mahkamah Partai Politik, dan Akademisi;</li> <li>3. Merencanakan kegiatan Kunjungan Kerja dalam rangka sosialisasi tugas dan fungsi MKD</li> </ol>

**Keterangan :** Info Dwi Mingguan Dikelola oleh Tim Gabungan / Sinergi antara Badan Keahlian, Para Kabag Set AKD Deputi Persidangan, dan Tenaga Ahli AKD

*Handwritten signature and date:*  
 20/3/21